

134-##_Research Results-363-1- 2-20190719.docx

by

Submission date: 26-Aug-2019 08:24AM (UTC+0700)

Submission ID: 1163375595

File name: 134-##_Research Results-363-1-2-20190719.docx (63.27K)

Word count: 7179

Character count: 48736

SANALISIS ³ KEBIJAKAN LUAR NEGERI FILIPINA TERHADAP TIONGKOK TERKAIT SENGKETA LAUT TIONGKOK SELATAN PADA MASA DUTERTE ¹

Shintia Ramadani² Sofia Trisni³

Andalas of International Studies (ASSIST) Universitas Andalas;

email : shintiaramadani11@gmail.com

Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) ;

email : sofi_hi01yahoo.com

Abstract

⁶⁷ Philippines and China disputes in the South China Sea have shown an increase in intensity since starting in 1947 along with the increasing of China aggressiveness. Philippines foreign policy before Duterte tended to be confrontational in response to China's aggressiveness. Meanwhile ⁵⁸ in the era of Duterte administration, the policy became more cooperative. ³⁰ This study aims to identify and describe the process of taking Philippine foreign policy towards China's aggressiveness regarding the dispute between the two countries. The conceptual framework used is ⁵⁵ theory of rational choice models from Charles Kegley and Shanon Blanton. The method used is qualitative with a descriptive approach and uses secondary data. Based on the theory, authors finds the actors of policy makers, Duterte and supported by the Senate, have motivations to maintain a large economic and security interest in China. At the policy selection stage, Philippines issued a rational policy that was cooperative.

Key Words : foreign Policy, cooperative, rational choice model, philippines, and south china sea

Abstrak

Sengketa antara Filipina dan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan menunjukkan peningkatan intensitas semenjak dimulai tahun 1947 bersamaan dengan meningkatnya agresivitas Tiongkok di wilayah sengketa. Kebijakan yang dikeluarkan Filipina pada zaman sebelum Duterte cenderung konfrontatif di dalam menanggapi agresivitas Tiongkok. Sementara itu di zaman pemerintahan Duterte terjadi perubahan kebijakan Filipina menjadi lebih kooperatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menggambarkan proses pengambilan kebijakan luar negeri Filipina terhadap agresivitas Tiongkok terkait sengketa kedua

³⁷

³⁷ mal ini adalah elaborasi dari penelitian skripsi dengan judul yang sama

² Alumni Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas angkatan tahun 2015.

³ Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas

negara di Laut Tiongkok Selatan. Kerangka konseptual yang digunakan adalah teori pembuat⁶⁶ kebijakan *rational choice model* dari Charles Kegley dan Shanon Blanton. Adapun metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan dekspiritf dan menggunakan data sekunder. Berdasarkan teori yang digunakan, penulis menemukan bahwa para aktor pembuat kebijakan terutama Duterte didukung oleh Senat memiliki motivasi mempertahankan kepentingan ekonomi dan keamanan yang besar terhadap Tiongkok. Sehingga pada tahap pemilihan kebijakan, Filipina mengeluarkan kebijakan rasional yang bersifat kooperatif di dalam menghadapi agresivitas Tiongkok.

Key Words : kebijakan luar negeri, filipina, rational choice model, kooperatif, laut¹⁹ tiongkok selatan

PENDAHULUAN

Laut Tiongkok Selatan merupakan wilayah yang menjadi sumber perebutan wilayah yang paling kompleks saat ini (Polling, 2013: 11). Potensi strategis dan sumber daya alam berupa hidrokarbon serta ikan yang sangat kaya membuat banyak negara mengklaim wilayah ini. Terdapat enam negara yang memberikan klaim tumpang tindih terhadap wilayah ini diantaranya adalah Brunei Darussalam, Tiongkok, Filipina, Malaysia, Taiwan dan Vietnam (Apriwan, 2016: 138). Sengketa ini kemudian mengalami peningkatan intensitas selama lebih dari satu dekade terakhir dimana Tiongkok menjadi aktor sentral di dalamnya. Hal dikarenakan klaim Tiongkok berdasarkan garis imajiner *Nine Dash Line* dimana cakupan wilayah yang diklaim merupakan yang terbesar diantara negara-negara lainnya.

Filipina adalah salah satu negara yang bersengketa dengan Tiongkok terkait klaim yang saling tumpang tindih di Laut Tiongkok Selatan. Adapun wilayah yang menjadi perebutan kedua negara adalah wilayah Kepulauan Spartly dan Dangkanan Karang Scarborough.⁴ Sementara itu klaim Tiongkok meliputi wilayah Kepulauan Paratas, Kepulauan Parcel, Kepulauan Spartly dan Kepulauan Macclesfield serta lebih dari 115 buah kepulauan kecil disekitarnya termasuk Dangkanan Karang

⁶ "Official Website of Departement of Foreign Affairs Philippines," Philippine Position on Bajo Masinloc (Scarborough Shoal) and The Waters within Its Vicinity", 2012 <http://www.officialgazette.gov.ph/2012/04/18/philippine-position-on-bajo-de-masinloc-and-the-waters-within-its-vicinity/>, diakses pada 28 September 2018 Pukul 17.37

Scarborough.⁵ Beberapa bentuk sengketa langsung antara Filipina dan Tiongkok adalah tindakan agresif Tiongkok pada tahun 1955 ketika Tiongkok melakukan pendudukan atas Dangkan Karang Mischeif Reef yang merupakan bagian dari Kepulauan Spartly. Oleh karena itu, pada tahun 1965, Filipina membangun menara setinggi 27,33 meter sebagai bentuk pengukuhan klaim mereka (Farhana, 2014). Agresivitas Tiongkok semakin masif saat pasukan militernya melakukan penghadangan terhadap kapal nelayan Filipina di Kepulauan Palawan pada tahun 2011 (Thayler, 2011: 79). Militer Filipina juga dihadang oleh militer Tiongkok saat menangkap delapan kapal penangkap ikan nelayan Tiongkok yang melakukan perusakan biota laut di sekitar Dangkan Karang Scarborough pada tahun 2012 (Dyan, 2012). Pada tahun 2014 Tiongkok juga secara masif melakukan pembangunan pangkalan militer di beberapa dangkan karang di Kepulauan Spartly (Dance, 2014).

Agresivitas Tiongkok ditanggapi dengan kebijakan yang bersifat konfrontatif oleh Filipina di masa pemerintahan sebelum Duterte. Pada masa pemerintahan Joseph Estrada tepatnya pada tahun 1999, Filipina meratifikasi Visiting Forces Agreement (VFA) dengan Amerika Serikat. Di dalam VFA terdapat kesepakatan dimana pemerintah Filipina mengizinkan adanya kekuatan militer Amerika Serikat di Filipina serta latihan militer kedua negara di LTS. Hal ini juga berlaku pada masa pemerintahan Presiden Benigno Aquino (Yost, 2013). Pada tahun 2013, Aquino membawa sengketa LTS dengan Tiongkok ini ke Mahkamah Arbitrase Internasional. Pada tahun 2016 Aquino menambah anggaran militernya dari sebesar \$ 1,74 miliar. Untuk menambah kapasitas militernya, Aquino juga melakukan latihan militer bersama dengan Vietnam dan Amerika Serikat (Green, 2016).

Pada masa pemerintahan Rodrigo Roa Duterte terdapat kecenderungan perubahan kebijakan luar negeri Filipina di Laut Tiongkok Selatan. Kebijakan luar negeri pada masa Duterte cenderung lebih kooperatif dibandingkan dengan pendahulunya. Pendekatan ini kemudian tercermin dari beberapa kebijakan yang

⁵BBC 24 vs, "Sengketa Kepemilikan Laut Tiongkok Selatan", BBC Indonesia, 2011, https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2011/07/110719_spratlyconflict, diakses pada 20 September 2018 Pukul 08.54

dikeluarkan Filipina semenjak tahun 2016. Kebijakan pertama adalah usaha untuk mendekatkan diri dengan Tiongkok pada bulan November 2016. Duterte melakukan kunjungan ke Tiongkok dan bertemu Presiden Xi Jin Ping untuk membahas dan meningkatkan hubungan bilateral kedua negara. Tiongkok merupakan negara pertama yang dikunjungi oleh Duterte diluar negara-negara ASEAN semenjak menjabat (Tamatoka, 2017: 135).

Kebijakan kedua adalah pembentukan mekanisme konsultasi bilateral antara Filipina dan Tiongkok pada tahun 2017 yang terdapat pada butir ke-13 *Joint Statement between The Government of the Republic of Philippines and The Government of People's Republic of Tiongkok*.⁶ Kebijakan ketiga adalah *joint ventures* terkait *oil exploration* kedua negara pada tahun 2018 di kawasan Reed Bank. Di dalam kesepakatan tersebut, terdapat kesepakatan pengelolaan kekayaan alam dengan persentase 60 % untuk Tiongkok dan 40 % untuk Filipina (Reuters, 2018).

Kebijakan-kebijakan diatas pada dasarnya berbeda dengan kecenderungan kebijakan yang dikeluarkan oleh Filipina sebelum masa Duterte. Kebijakan-kebijakan tersebut khususnya *joint ventures* terkait *oil exploration* juga menimbulkan kerugian berupa hilangnya wilayah Reed Bank yang merupakan cadangan kebutuhan energi listrik Filipina dengan potensi gas alamnya yang besar (Malino, 2018). Oleh karena itu, tulisan ini mencoba untuk menggambarkan dan menganalisis proses pengambilan kebijakan luar negeri yang melahirkan kebijakan bersifat kooperatif di Filipina pada masa pemerintahan Duterte.

PEMBAHASAN

Kerangka Konseptual

- *Rational Choice Model* (Teori Pembuatan Kebijakan Luar Negeri)

Menurut Shannon L. Blanton dan Charles Kegley sesuai dengan asumsi dasar realis, proses pembuatan kebijakan luar negeri oleh setiap pemimpin dan

⁶Official website of Philippines Departments of Foreign Affairs, "Joint Statement between The Government of the Republic of Philippines and The Government of People's Republic of Tiongkok", 2017, <https://www.dfa.gov.ph/dfa-news/statements-and-advisoriestupdate/14643-joint-statement-between-the-government-of-the-republic-of-the-philippines-and-the-government-of-the-people-s-republic-of-Tiongkok> diakses pada 20 September 2018 Pukul 11.36

pembuat kebijakan lainnya akan selalu mengambil pilihan yang sama. Istilah inilah yang kemudian dikenal dengan *state as unitary actors*. Berangkat dari asumsi inilah kemudian aktor di dalam *rational choice* membuat sebuah kebijakan didasarkan pada rasionalitas kalkulasi keuntungan dan kerugian. Negara akan mengambil sebuah kebijakan yang dengan kebijakan tersebut menimbulkan kerugian seminimal mungkin terhadap sebuah kepentingan negara. Selanjutnya terdapat empat tahap dari proses pengambilan kebijakan luar negeri dengan menggunakan *Rational Choices Model* ditunjukkan oleh bagan berikut (Blanton, 2017 : 58) :

I. Problem Recognition and Definition

Tahapan pertama yang akan dilakukan oleh pembuat kebijakan adalah mengidentifikasi dan mengklarifikasi secara spesifik permasalahan yang dihadapi. Pada tahap ini pembuat kebijakan akan mengidentifikasi permasalahan dengan jelas dan menentukan kebijakan rasional yang diambil oleh negara sebagai solusi untuk memecahkan sebuah permasalahan. Pembuat kebijakan mengidentifikasi dan menentukan karakteristik permasalahan dengan mengumpulkan keseluruhan informasi yang terkait sebagai berikut :

- a. Segala bentuk tindakan dan aksi dari faktor eksternal yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi.
- b. Motivasi yang terdapat dari tindakan tersebut (di dalam artian motivasi dari setiap kebijakan negara lain yang menimbulkan dampak kepada negara tersebut).
- c. Kapabilitas dari setiap aktor lain yang terkait di dalam permasalahan.
- d. Kondisi dan kecenderungan sistem internasional secara global.

II. Goals Selection

Setelah mengidentifikasi permasalahan, pembuat kebijakan menentukan ¹⁷ solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Solusi inilah yang nantinya akan menjadi sebuah kebijakan yang ditetapkan oleh negara. Solusi juga menggambarkan tujuan dan didasarkan kepada ⁷⁰ kepentingan negara. Oleh karena itu, penting untuk terlebih dahulu menentukan tujuan yang ingin dicapai oleh

negara. Untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai oleh negara, para pengambil keputusan mengidentifikasi dan mengurutkan keseluruhan nilai dan komponen kepentingan yang ada seperti keamanan dan perekonomian. Proses pengurutan ini kemudian dilakukan di dalam bentuk yang hirarki (berjenjang) dimulai dari pilihan terbaik hingga yang terburuk. Pilihan yang diambil adalah pilihan dengan kemungkinan keberhasilan untuk dicapai.

III. *Identification Options and Alternatives*

Setelah menentukan tujuan yang ingin dicapai, pembuat kebijakan menentukan solusi atau tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut di dalam bentuk kebijakan. Oleh karena itu, di dalam rangka memaksimalkan tujuan dan kepentingan negara, maka harus terdapat beberapa alternatif kebijakan yang dibuat. Pilihan-pilihan kebijakan ini kemudian diurutkan satu persatu dan dikalkulasikan analisis keuntungan dan kerugiannya.

Alternatif kebijakan dalam hal ini adalah bahwa kebijakan tersebut mampu untuk merubah keadaan dan situasi permasalahan yang dihadapi sehingga di masa depan menjadi lebih baik. Oleh karena itu, alternatif kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang pada satu sisi walaupun tidak terlalu menguntungkan tetapi bisa mengamankan kepentingan minimum agar negara tidak menderita kerugian yang jauh lebih besar. Kepentingan yang dimaksud dapat berupa keamanan, ekonomi dan perlindungan wilayah negara. Pada intinya, pembuat kebijakan harus memprediksikan konsekuensi dari setiap alternatif kebijakan agar nantinya menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan dan setidaknya mampu memenuhi kebutuhan minimal sebuah negara.

IV. *Choice*

Setelah menganalisis kalkulasi keuntungan dan kerugian dari masing-masing alternatif kebijakan tentunya dengan pendekatan rasional, pembuat kebijakan memilih satu alternatif kebijakan yang memiliki kemungkinan maksimum di dalam mencapai tujuan dan kepentingan negara. Untuk itu, pembuat kebijakan mengambil kebijakan berdasarkan analisis untung rugi masing-masing pilihan. Salah satu cara yang dapat dijadikan pedoman oleh pembuat kebijakan adalah mengukur *gap* (jarak)

antara masing-masing pilihan dengan tujuan yang diinginkan. Hal ini berarti pembuat kebijakan memilih alternatif kebijakan yang menjadi solusi permasalahan dan sesuai dengan tujuan negara.

Analisis

Untuk menganalisis proses dari pembuatan kebijakan luar negeri Filipina yang bersifat kooperatif, penulis menggunakan empat tahapan model pembuatan kebijakan luar negeri rational choice sebagai berikut :

I. *Problem Recognition and Definition*

Pada tahap *problem recognition and definition*, terdapat empat indikator yang digunakan di dalam menganalisis permasalahan sebagai berikut:

- Segala bentuk tindakan dan aksi terhadap faktor eksternal yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi

Di dalam pada tahap ini penulis menganalisis tanggapan yang di keluarkan faktor eksternal dari permasalahan. Faktor eksternal yang dimaksud adalah tanggapan dari aktor internal pembuat kebijakan terhadap permasalahan yang dihadapi. Terdapat tiga aktor internal yang berperan di dalam pembuatan kebijakan luar negeri Filipina. Pertama adalah Presiden Filipina, Rodrigo Duterte sebagai lembaga eksekutif. Pada awal pemerintahannya, Duterte menyadari adanya tindakan Tiongkok yang melakukan pembangunan secara masif di Kepulauan Sparty. Namun menurut Duterte hal terebut tidak ditunjukkan kepada Filipina. Sebagaimana pernyataan Duterte yang disampaikan dalam Pidatonya dihadapan Himpunan Pengusaha Tiongkok-Filipina pada akhir Februari 2018 berikut :

*Now China building structures and military bases, I must admit it. But is it intended for us? It's (is not intended for us, it's really intended against those who The Chinese think would destroy them and that is America).*⁷

Terkait pembangunan di Dangkan Karang Scarborough, Duterte melihat bahwa permasalahan Dangkan Scarborough bukanlah merupakan permasalahan

⁷Mindanao News, "Duterte Transcripts : Chinese-Filipino Business Club", 2018, <https://www.midanews.com/duterte-files/2018/02/duterte-transcripts-chinese-filipino-business-club-19-feb-2018> , diakses pada 13 Februari 2018 Pukul 12.52

yang sangat serius bagi keutuhan wilayah Filipina.” *I will not go into war (just) because of Scarborough Shoal. The Shoal is not a territorial issue but (involves) exclusivity (of) economic zones*” (Delizo, 2016). Dari pernyataan tersebut Duterte melihat bahwa permasalahan sengketa Dangkan Scarborough tidak mengganggu keutuhan wilayah Filipina karena tindakan Tiongkok dilakukan di wilayah ZEE bukan teritorial Filipina.

Sementara itu jika melihat tanggapan dari *interest grup* di dalam menanggapi tindakan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan, merupakan hal yang berbeda dibandingkan dengan Presiden Duterte. Hal ini dapat terlihat dari aksi protes yang dilakukan oleh sekelompok demonstran di depan Konsulat Tiongkok di distrik Makati pada tanggal 8 Mei 2012. Para demonstran yang terdiri dari 1000 orang yang berasal dari kelompok *civil society*. Aksi “anti-China” ini diwarnai dengan aksi pembakaran bendera Tiongkok oleh salah seorang aktivis. Para demonstran mengkritik keras aksi pendudukan yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap Dangkan Karang Scarborough beberapa hari sebelumnya. Para demonstran menilai Tiongkok telah melakukan tindakan yang mengganggu keutuhan wilayah Filipina (Fransisco, 2018).

Sementara itu dari segi kongres, ketua Senat Filipina pada zaman Duterte Feliciano Belmonte menyebut bahwa ia sangat berharap bahwa Pemerintah di zaman Duterte dapat menyelesaikan kasus Laut Tiongkok Selatan dengan tekad dan kebijaksanaan. Hal ini tergambar di dalam pernyataan Feliciano sebagai berikut (Bundang, 2018) :

4
Our country must be primed to take a leading role in the integration of the economies of the Southeast Asian region. The dispute on the West Philippine Sea will test the mettle of the next administration in diplomacy. We hope that the incoming administration will confront these challenges with wisdom and resolve.

Selanjutnya di dalam melihat permasalahan sengketa antara Filipina dan Tiongkok, Senat melihat bahwa upaya pendekatan yang berusaha dilakukan oleh Duterte akan memberikan keuntungan yang lebih bagi Filipina. Hal ini

sebagaimana tergambar di dalam pernyataan anggota kongres Filipina Gary C. Alejano sebagai berikut :⁸

11

The relationship that the President (Duterte) is building with the Chinese, and the plans he would like to pursue, including joint military exercises with China, would not renege on the country's treaties with other ally countries and would benefit the country more.

Dari beberapa pembahasan diatas penulis menyimpulkan bahwa pemerintah Filipina di Masa Duterte adalah baik Duterte sebagai Presiden, Kelompok Kepentingan dan Senat Filipina menyadari kehadiran Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. Namun kemudian terdapat perbedaan di dalam memandang permasalahan klaim wilayah di Laut Tiongkok Selatan. Duterte melihat bahwa permasalahan di Laut Tiongkok Selatan adalah dalam rangka mempertaruhkan kepentingan ekonomi dan keamanan nasional Filipina. Sementara senat dan kelompok kepentingan terutama masyarakat melihat bahwa klaim Filipina di Laut Tiongkok Selatan adalah hal yang wajib dipertahankan. Meskipun demikian Senat dalam hal ini mengindikasikan adanya harapan dari pemerintah di zaman Duterte untuk mengambil kebijakan dan langkah yang lebih diplomatis terhadap Tiongkok termasuk di dalamnya adalah mendekatkan diri dengan Tiongkok.

- Motivasi dari tindakan aktor yang terlibat

15

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa Presiden, Senat dan Masyarakat memiliki pandangan yang berbeda di dalam melihat permasalahan di Laut Tiongkok Selatan. Di dalam bagian ini penulis menjelaskan motivasi dari ketiga aktor di dalam mendefinisikan permasalahan di Laut Tiongkok Selatan. Motivasi inilah yang kemudian menyebabkan terdapat perbedaan pandangan dari ketiga aktor di dalam mendefinisikan ancaman Tiongkok.

Pertama penulis melihat motivasi yang dimiliki oleh Pemerintah di dalam hal ini adalah Presiden Duterte sebagai Presiden Filipina. Sebelum menjabat sebagai Presiden Filipina, tepatnya di masa pemilihan Presiden, sudah terdapat indikasi yang menyebabkan Duterte telah memfokuskan kebijakannya di dalam

⁸ 39 ss and Public Affairs Bureau of House of The Representatives Republic of The Philippines, "DND, AFP update House on national security issues", 2017, <http://www.congress.gov.ph/press/details.php?pressid=10050&key=west%20philippine%20sea>, diakses pada 19 Maret 2019 Pukul 13.02

membangun ekonomi Filipina. Pada saat menjadi kandidat Presiden Filipina, Duterte telah membuat program ekonomi sosial di dalam rangka rencana pembangunan nasional (*Socio Economic Program of Future National Development*) yang terdiri dari 10 rencana. Beberapa rencana dari program pengembangan ekonomi tersebut antara menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi dan penghapusan hambatan investasi asing (Panarina, 2017: 593). Hal ini mengindikasikan bahwa motivasi utama dari pembuat kebijakan di dalam hal ini adalah Duterte sebagai kepala lembaga eksekutif adalah untuk mempertahankan kepentingan ekonominya.

Motivasi dari senat Filipina sebagai aktor kedua adalah bahwa kebijakan yang diambil harus melindungi kepentingan dan keutuhan wilayah negara. Oleh karena itu Senat menginginkan agar pemerintah di masa Duterte dapat mengambil tindakan yang bijak. Berdasarkan analisa penulis hal ini berkaitan dengan upaya abritase yang ditempuh Filipina di zaman Aquino tidak dipatuhi oleh Tiongkok. Sementara itu jika dilihat dari motivasi yang dimiliki oleh aktor ketiga yakni dari *interest grup* Filipina terlihat bahwa motivasi yang dimiliki adalah untuk mempertahankan keutuhan wilayah Filipina. Hal ini terlihat dari demonstrasi yang dari masyarakat yang menuntut bahwa keutuhan wilayah Filipina adalah hal yang bersifat mutlak.

- Kapasitas dari aktor yang terlibat di dalam permasalahan (pembuatan kebijakan)

Di dalam hal ini penulis akan membandingkan kapasitas dari tiga aktor yang terlibat di dalam pembuatan kebijakan. Adapun aktor-aktor tersebut adalah Presiden Duterte sebagai kepala negara, Senat sebagai perwakilan parlemen dan kelompok kepentingan yang terdiri dari masyarakat. Presiden sebagai lembaga eksekutif dan Senat sebagai lembaga legislatif merupakan aktor yang terlibat langsung di dalam pembuatan kebijakan luar negeri Filipina sebagaimana yang diamanatkan konstitusi Filipina 1987 dan *Philippines Foreign Service Act 1991*. Sedangkan kelompok kepentingan merupakan aktor yang mempengaruhi kebijakan. Berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam ketentuan konstitusi Filipina 1987 sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 21 “*No Treaty or International Agreement shall be valid and effective unless concurred in by at least*

two thirds of all members of the senate.⁹ Hal ini menyiratkan adanya kewajiban dari Presiden sebagai kepala negara untuk terlebih dahulu mengajukan bentuk kebijakan luar negeri kepada senat. Hal ini diarenakan tidak ada sebuah kebijakan yang dapat berlaku secara resmi jika kemudian tidak setuju oleh 2/3 dari seluruh anggota Senat.

Berdasarkan ketentuan artikel tersebut, penulis melihat bahwa di Filipina Presiden dan Senat adalah dua aktor yang mempunyai kapasitas yang cukup krusial di dalam menentukan kebijakan luar negeri. Jika kemudian dianalisis dengan kebijakan kooperatif Filipina, maka kapasitas dari Senat tentunya sangat mempengaruhi lahirnya kebijakan tersebut. Sehingga meskipun kemudian publik Filipina menurut survey sebuah lembaga penelitian yang bernama *Social Weather Stations* menyebutkan 84 % menginginkan adanya pengontrolan yang ketat oleh pemerintah Filipina terhadap agresivitas Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan¹⁰ yang berujung pada aksi protes, tetap kemudian tidak terlalu mempengaruhi kebijakan karena dua aktor dominan yang ditugaskan oleh konstitusi telah menentukan sikap.

- Kondisi dan kecenderungan sistem internasional secara global

Pada era 2000 an hingga saat ini terjadi perubahan di dalam sistem internasional. Sistem internasional perlahan mulai berubah dari dominasi Amerika Serikat yang sangat dominan sebagai *superpower* setelah perang dingin hingga kemunculan kekuatan baru di dalam sistem internasional. Kemunculan lima negara yang termasuk di dalam BRICS (Brazil, Russia, India, China dan Afrika Selatan) terutama di dalam dominasi mereka secara ekonomi berdampak kepada peranan mereka yang mulai penting di dalam sistem internasional (Jisi, 2010: 6651). Dengan kemunculan lima negara tersebut tentunya membuat kedigdayaan Amerika Serikat dan aliansinya mulai mendapat tantangan.

⁹Official Website of The Government of Philippines, "The Constitution of The Republic of The Philippine", <https://www.officialgazette.gov.ph/constitutions/1987-constitution/>, diakses pada 21 Maret 2019 Pukul 19.19

¹⁰Social Weather Sessions, Third Quarter 2018 Social Weather Survey: Pinoys maintain anti-Chinese stance on West Philippine Sea issue", 2018, <https://www.sws.org.ph/swsmain/artcldisppage/?artcsyscode=ART-20181119235355>

Semenjak tahun 2009, BRICS mulai melakukan beberapa tindakan termasuk di dalamnya meminta reformasi di dalam Dewan Keamanan PBB, reformasi sistem dan lembaga keuangan internasional dan rencana pembentukan *Global South Cooperation* yang saat ini sudah terbentuk (Jisi, 2010: 6652). Dengan demikian maka BRICS termasuk Tiongkok didalamnya mulai memberikan pengaruh yang signifikan terutama di dalam bidang ekonomi dan politik internasional (Jash, 2017: 6).

Filipina menanggapi adanya indikasi melemahnya kedigdayaan Amerika Serikat dan meningkatnya pengaruh negara-negara BRICS terutama Tiongkok dan Rusia di dunia. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Duterte di dalam pidatonya forum bisnis Filipina dan Tiongkok pada tahun 2016 sebagai berikut (Blancard, 2016) :

2
In this venue, your honors, I announce my separation from the United States. Both in military, not maybe social, but economics also. America has lost. I've realigned myself in your ideological flow and maybe I will also go to Russia to talk to (President Vladimir) Putin and tell him that there are three of us against the world - China, Philippines and Russia. It's the only way.

Dari pernyataan diatas Duterte melihat bahwa Amerika Serikat tidak lagi menjadi negara adidaya baik dalam hal kekuatan militer dan ekonomi. Oleh karena itu Duterte melihat dan memutuskan bahwa Filipina tidak akan lagi menjadikan Amerika Serikat sebagai aliansi terdekat. Sebaliknya, Duterte melihat dua negara BRICS yaitu Tiongkok dan Rusia sebagai negara yang memiliki kekuatan kuat secara ekonomi dan juga dalam hal militer. Oleh karena itu dari pernyataan diatas Duterte berupaya untuk membangun hubungan yang kuat dengan kedua negara.

II. Goals Selection

Pada tahap ini pengambil kebijakan menentukan tujuan negara hingga nantinya dapat mengambil kebijakan sesuai dengan permasalahan yang akan dihadapi. Sebagaimana konsep *rational choice* dari Kegley, tujuan negara dapat diterjemahkan di dalam bentuk kepentingan nasional suatu negara. Menurut Kegley kepentingan tersebut dapat berupa kepentingan ekonomi dan keamanan suatu negara. Di dalam kasus Filipina tujuan pembuatan kebijakan luar negerinya

pembuat kebijakan diharuskan mengeluarkan kebijakan luar negeri yang melindungi keutuhan wilayah dan kepentingan nasional. Kepentingan nasional antara lain berupa perlindungan dan peningkatan keamanan nasional, mempromosikan dan meningkatkan ekonomi.¹¹ Di dalam menganalisis kebijakan Filipina di Laut Tiongkok Selatan ini, penulis menggunakan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh pembuat kebijakan luar negeri Filipina yaitu perlindungan keutuhan wilayah, kepentingan ekonomi dan kepentingan keamanan.

- Perlindungan Keutuhan Wilayah

Sebagai salah satu negara yang terlibat di dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan, Filipina¹² tentunya memiliki kepentingan di dalam melindungi keutuhan wilayah di Laut Tiongkok Selatan. Hal ini dikarenakan Filipina mengklaim beberapa wilayah di Laut Tiongkok Selatan yang meliputi sebahagian besar kepulauan Kepulauan Sparty (*Kalayan Island Group*) yang dimulai pada tahun 1950 serta Dangkan Karang Scabrorough yang diklaim pada tahun 2009 (Ortuoste, 2013: 240). Wilayah-wilayah tersebut kemudian diklaim oleh Filipina karena berdasarkan sejarah wilayah ini termasuk kedalam wilayah teritorial Filipina dan juga didasarkan kepada aturan UNCLOS dimana wilayah yang berjarak sejauh 200 mil laut tersebut termasuk ke dalam wilayah Filipina (Rosen, 2014: 3).

Luas wilayah KIG yang meliputi sebahagian Kepulauan Sparty (7 Pulau dan Karang) adalah seluas 168.287 km² (Homre, 2016: 25). Sedangkan luas Dangkan Karang Scarborough adalah sebesar 180 km². Total dari kedua wilayah yang diklaim oleh Filipina mencapai 168.467 km². Oleh karena itu dari satu sisi merupakan sebuah keniscayaan bagi Filipina untuk melindungi kedua wilayah tersebut di dalam rangka mengamankan kepentingan nasional mereka.

- Kepentingan Ekonomi

Diluar sengketa kedua negara di Laut Tiongkok Selatan, Filipina dan Tiongkok dapat dikatakan memiliki hubungan ekonomi yang baik meskipun kedua

¹¹Department of Foreign Affairs Philippine, "DFA Organizational", Data Base Management of DFA, https://www.dbm.gov.ph/wp-content/uploads/OPCCB/OPIF_2007/dfa.pdf, diakses pada 20 April 2019 Pukul 20.47

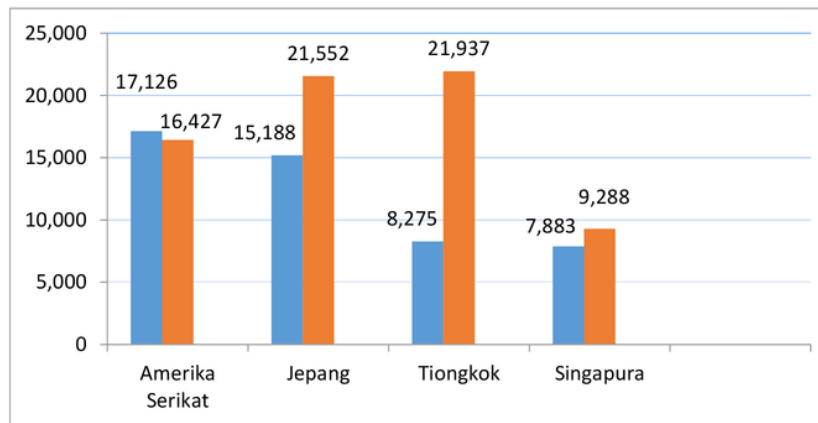
negara sering terlibat di dalam beberapa konflik. Hubungan ekonomi yang sudah dimulai dari masa sebelum pra-kolonial ini terus meningkat ditengah-tengah ketegangan politis antara kedua negara. Jumlah perdagangan antara kedua negara dari tahun 1971 hingga akhir 1990-an terus mengalami peningkatan. Pada era 2000-an Tiongkok bahkan merupakan salah satu negara yang melakukan kegiatan perdagangan terbesar dengan Filipina (Ilano, 2017: 81). Hubungan ekonomi yang baik ini juga menggambarkan kepentingan yang cukup besar Filipina terhadap Tiongkok.

Pada era kontemporer Tiongkok hadir sebagai negara yang krusial bagi perekonomian Filipina. Pada tahun 2016, Tiongkok merupakan negara mitra dagang terbesar bagi Filipina. Jumlah transaksi perdagangan antara Filipina dan Tiongkok mencapai US\$ 21.937 miliar atau mencakup 15,5% dari total seluruh perdagangan Filipina. Dari total jumlah tersebut, nilai impor Filipina terhadap Tiongkok mencapai US\$ 15.564,90.¹² Hal ini menempatkan Tiongkok di posisi pertama sebagai negara eksportir bagi Filipina sekaligus juga sebagai negara mitra dagang terbesar. Tiongkok sendiri menggeser posisi Amerika Serikat dan Jepang yang pada tahun 2006 menempati posisi pertama dan kedua. Pada saat itu nilai impor Filipina terhadap Tiongkok hanya mencapai US\$ 3.647,35 miliar dari total US\$ 8.275,01 perdagangan kedua negara.¹³ Berikut ini merupakan grafik yang menggambarkan perbedaan total perdagangan antara Filipina dan Tiongkok pada tahun 2006 dan 2016 :

¹² Official Website of Philippine Statistics Authority Republic of The Philippines, "Foreign Trade of Philippines: 2016", <https://psa.gov.ph/content/foreign-trade-statistics-philippines-2016>, diakses pada 1 November 2018 Pukul 11.01

¹³ Philippine National Statistics Office 2006 dalam Morada, Noel M., "The Rise of China and Regional Response : A Philippine Perspective", National Institute for Defense Studies Publication, 2007, Chapt. IV, hal 113, http://www.nids.mod.go.jp/english/publication/joint_research/series4/pdf/4-4.pdf, diakses pada 01 September 2018 Pukul 11.31

Grafik 4.1 Perbandingan Nilai Perdagangan Filipina Pada Tahun 2006
Dan 2016 (Dalam Satuan Miliar Dolar)



Sumber : data diolah dari sumber Official Website Official Website of Philippine Statistics Authority Republic of The Philippines <https://psa.gov.ph/content/foreign-trade-statistics-philippines-2016> dan Morada, Noel M., "The Rise of China and Regional Response : A Philippine Perspective", National Institute for Defense Studies Publication, 2007

Dari total nilai perdagangan tersebut, besi dan baja merupakan salah satu produk yang memiliki nilai import terbesar. Berdasarkan data tahun 2016, Filipina mengimpor besi dan baja dari Tiongkok senilai \$2.332 miliar atau setara dengan 10.5 % dari total seluruh impor Filipina (Morada, 2007: 114). Dari segi produk ekspor, Tiongkok merupakan pasar terbesar bagi produk elektronik Filipina . Dari total keseluruhan nilai ekspor, 59.7 % dipasarkan ke Tiongkok. Hal ini melampaui jumlah ekspor ke Amerika Serikat yang hanya berjumlah 42% dan Jepang yang hanya 27,9 %. Hal ini membuktikan bahwa Tiongkok merupakan pasar terbesar bagi produk elektronik Filipina. Sebaliknya, Tiongkok adalah negara yang memasarkan produk elektroniknya di dalam jumlah yang terkecil dengan presentase impor sebesar 21,2 %.

Selain dari sektor perdagangan, Filipina juga tergantung kepada sektor lainnya terhadap Tiongkok salah satunya adalah bidang infrastruktur. Sesuai dengan misi Duterte dimana akan menjadikan Filipina di masanya mempunyai infrastruktur yang baik atau yang dikenal dengan "*Golden Age of Infrastructure*". Untuk mewujudkan hal tersebut, Duterte menyusun *Three -Year Rolling*

Infrastructure Plan (TRIP) yang memfokuskan anggaran dari tiga sumber dimana salah satunya adalah dari dana *Official Development Assistance* (ODA). Pada tahun 2017, Tiongkok memberikan dana ODA sebesar \$11,7 juta kepada Filipina. Dana tersebut diinvestasikan kepada 18 dari total 75 proyek pembangunan andalan Duterte.¹⁴

Kepentingan Filipina terhadap Tiongkok selanjutnya adalah di dalam bidang investasi (*foreign direct investment*). Di tahun 2017, Tiongkok berinvestasi sebesar 2.339 juta peso atau berkisar sebesar 2,2 % dari total FDI Filipina. Investasi Tiongkok tersebut meningkat sebesar 814 juta peso atau 53,6 % dari 1.519 juta peso pada tahun 2016.¹⁵ Hal ini membuktikan terdapat potensi investasi dari Tiongkok terhadap Filipina yang cukup besar. Hal ini tentunya menjadi salah satu pertimbangan bagi Duterte di dalam menunjang program di dalam peningkatan perekonomian Filipina.

Terdapat beberapa sektor utama investasi Tiongkok di Filipina. Sebelum Duterte menjabat, tepatnya pada tahun 2014 Tiongkok berinvestasi sebesar \$1 miliar di bidang energi. Dua perusahaan besar Tiongkok yaitu *Power Construction Corp on AC Energy* dan *Power Partners Ltd* berinvestasi di dalam rekayasa, pengadaan dan pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara di Lanao del Norte Mindanao. Sementara itu di bidang pertambangan, terdapat 25 perusahaan Tiongkok yang berinvestasi dan beroperasi di Filipina. Perusahaan tersebut diantaranya adalah *China Metallurgical Construction Corps* dan *Guo Long Mining Cooperation*. Sektor ketiga yang juga merupakan fokus dari investasi Tiongkok adalah pada jasa pelayaran. Tiongkok berinvestasi di 10 perusahaan kargo terbesar di Filipina (Stern, 2016).

- Kepentingan Keamanan

Kepentingan Filipina terhadap Tiongkok dapat dianalisis dengan bertolak kapada National Security Policy (NSP) Filipina tahun 2017-2022. Di dalam

¹⁴ United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, "The Philippine National Study : Infrastructure Financing Strategies for Sustainable Development", UNESCAP Report, 2018, hal 3

¹⁵ Official Website of Philippines Statistics Authority "Foreign Investment In The Philippines : Fourth Quarter 2017", PSA Report, 2017, hal 35

dokumen resmi NSP tersebut terdapat beberapa kondisi ancaman secara internal yang dihadapi Filipina. Beberapa permasalahan meliputi ancaman dari jaringan terorisme di Selatan Filipina, kelompok kejahatan internasional dan permasalahan peredaran narkoba secara ilegal. Di dalam mencapai keamanan nasional tersebut, Filipina kemudian membangun kerja sama dengan negara lainnya. Tiongkok merupakan salah satu negara yang berkeja sama dengan Filipina di dalam menyelesaikan permasalahan domestiknya tersebut.¹⁶ Hal ini kemudian mengindikasikan Filipina mempunyai kepentingan terhadap Tiongkok di dalam mewujudkan keamanan nasionalnya.

Pertama adalah bantuan yang diberikan Tiongkok di dalam pemberantasan teroris di Marawi. Tiongkok telah banyak membantu di dalam pemberantasan Teroris di Marawi pada tahun 2017. Bantuan Tiongkok di dalam pemberantasan Teroris di Marawi kemudian dibicarakan lebih lanjut di dalam pertemuan bilateral kedua negara di pulau Hainan pada bulan April 2018. Di dalam pertemuan itu Xi Jinping menyatakan bahwa Tiongkok mendukung usaha Filipina di dalam memberantas terorisme, narkoba dan tindakan kriminal.. Peralatan senjata dari Tiongkok berupa senapan, peluru dan peralatan senjata jarak jauh sangat membantu operasi militer Filipina yang berhasil menewaskan pimpinan teroris Marawi, Isnolin Hapilon (Tiezzi, 2018). Hingga tahun 2018, Filipina telah menerima 3000 bantuan senjata dari Tiongkok (Palcido, 2018).

Kedua adalah bantuan Tiongkok di dalam kebijakan *War on Drugs* Filipina di dalam rangka memberantas peredaran narkoba ilegal yang telah masif di Filipina. Sebagaimana yang disampaikan oleh Duterte, Tiongkok merupakan satu-satunya negara yang menyatakan dukungan terhadap pemberantasan peredaran narkoba ilegal di Tiongkok. Dukungan tersebut tergambar di dalam MOU kerja sama antara Badan Pemberantasan Narkoba Filipina (PDEA) dan Biro Pengontrolan Narkotika Kementerian Kemanan Publik Tiongkok pada tahun 2016. Berdasarkan MOU tersebut, Tiongkok memberikan dukungan di dalam bentuk pembangunan empat fasilitas rehabilitasi dan terapi narkoba masing-masing dua buah di Pulau Luzon

¹⁶ National Security Council of Philippines, "National Security Policy for Change and Well-Being of The Filipino People", NSC Documents, 2017, hal 6-11

dan satu buah di Visayas dan Mindanao. Lebih lanjut, pemerintah Tiongkok juga memberikan hibah sebesar RMB 100 Juta atau 714, 57 Triliun peso untuk mengimplementasikan program anti peredaran narkoba ilegal dan kerja sama serta operasi di dalam penegakan pemberantasan narkoba (Mirasol, 2017).

III. *Identification Options and Alternatives*

Pada bagian ini penulis akan menganalisis pilihan kebijakan yang dapat diambil oleh Filipina di dalam merespon agresivitas Tiongkok di dalam mempertahankan kepentingan mereka di Laut Tiongkok Selatan. Berdasarkan analisis penulis terdapat dua alternatif pendekatan kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah Filipina di dalam menanggapi tindakan agresif Tiongkok yang berkaitan dengan kepentingan Filipina. Pendekatan kebijakan tersebut adalah mengeluarkan kebijakan yang bersifat reaktif dengan tindakan yang konfrontatif atau sebaliknya mengeluarkan kebijakan yang kooperatif. Oleh karena itu pada tahap ini dilakukan proses kalkulasi keuntungan dan kerugian berdasarkan kepentingan yang dimiliki oleh Filipina. Analisis tersebut tergambar di dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2 Kalkulasi Keuntungan dan Kerugian terhadap Alternatif Pendekatan
³ Kebijakan Luar Negeri Filipina terhadap Tiongkok Pada Masa Pemerintahan
 Duterte Terkait Sengketa Laut Tiongkok Selatan

Unsur-Unsur yang dipertimbangkan	Detail Pertimbangan	Dampak Kebijakan Kooperatif	Dampak Kebijakan Konfrontatif
Keutuhan Wilayah	Klaim terhadap wilayah yang dipersengketakan	Kemungkinan besar Filipina akan kehilangan wilayah KIG (Kepulauan Spartly) dan Dangkalan Karang Scarborough seluas 168.467 km ² .	Keutuhan Wilayah terlindungi (jika Filipina dapat mengamankan wilayah dari ancaman Tiongkok).

Ekonomi	1. Investasi	Investasi dibidang energi dan Kegiatan Pelayaran akan tetap berjalan lancar karena Tiongkok berinvestasi di 10 perusahaan kargo terbesar di Filipina.	Potensi kehilangan investasi senilai \$1 Miliar di bidang energi dimana Tiongkok berinvestasi di 25 perusahaan pertambangan dan eksplotasi minyak bumi termasuk di kawan LTS.
	2. Bantuan Pembangunan Infrastruktur	Kemungkinan peningkatan bantuan dan pinjaman. Salah satunya Keberlanjutan dari program andalan <i>Golden Age of Infrastructure</i> .	Potensi Kehilangan bantuan sebesar \$11,7 Juta (18 dari 75 proyek pembangunan infrastruktur)
	3. Perdagangan	Tiongkok merupakan salah satu dari 5 negara mitra dagang terbesar Tiongkok	Kerugian Kebutuhan 50 % Impor Baja dan Pemasaran Produk Elektornik Filipina yang berjumlah 59%.
Keamanan	1. Bantuan Senjata Penumpasan Teroris	Program Pemberantasan Terorisme yang menjadi bagian dari fokus kebijakan Duterte akan tetap berjalan	Potensi Kehilangan Bantuan Senjata dari Tiongkok Sebesar 3000 Senjata

	2.Bantuan Senjata Kebijakan War on Drugs	MOU dengan Tiongkok yang meliputi pemberantasan, rehabilitasi dan terapi Narkoba akan tetap berlanjut	Potensi Kehilangan Hibah sebesar 714,57 Triliun Peso dari Tiongkok di dalam pemberantasan narkoba.
--	--	---	---

Sumber : Hasil Analisis Penulis dari Berbagai Sumber

IV. Choice

Pada bagian ini pembuat kebijakan menentukan sikap di dalam menentukan langkah kebijakan luar negerinya. Hal ini tentunya didasarkan kepada analisis untung rugi yang telah dilakukan. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan diatas, maka terlihat Filipina di masa Duterte lebih memilih kebijakan yang bersifat kooperatif karena menimbulkan kerugian yang paling sedikit apabila dibandingkan dengan kebijakan yang bersifat konfrontatif di Laut Tiongkok Selatan. Kebijakan kooperatif telah menyelamatkan kepentingan ekonomi dan keamanan meskipun dilain sisi mengorbankan sebahagian wilayah yang diklaim. Berikut ini merupakan bentuk dari kebijakan-kebijakan kooperatif Duterte tersebut :

- Kebijakan Filipina di dalam Mendekatkan diri dengan Tiongkok

Tindakan pertama yang dilakukan oleh Duterte di dalam menerapkan kebijakan kooperatif di LTS adalah dengan berupaya mendekatkan diri kepada Tiongkok. Salah satu tindakan yang dilakukan Duterte adalah dengan melakukan kunjungan perdana ke Tiongkok dimana Tiongkok merupakan negara pertama yang ia kunjungi diluar negara Asia Tenggara. Dimana di dalam kunjungan tersebut terdapat beberapa pembicaraan seputar peningkatan hubungan kedua negara termasuk di dalamnya adalah mengenai penanganan permasalahan sengketa kedua negara di Laut Tiongkok Selatan (Tamatoka, 2017: 135).

Tindakan peningkatan hubungan diplomatik oleh Duterte tersebut tidak terlepas dari pernyataan Duterte sebelum dilantik pada 30 Juni 2016. Duterte menyatakan bahwa Filipina dibawah pemerintahannya akan mendekatkan diri

kepada Tiongkok. Duterte juga tidak akan melanjutkan kebijakan Filipina pada zaman Aquino yang melakukan modernisasi militer angkatan bersenjata Filipina untuk menghadapi Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan (Tamatoka, 2017: 7).

Membaiknya hubungan antara Filipina dan Tiongkok dengan langkah diplomatik Duterte juga berdampak terhadap hubungan antara Filipina dan Amerika Serikat terutama terkait dengan hubungan aliansi antara kedua negara. Di dalam pidatonya pada tanggal 12 September 2016, Duterte menyatakan bahwa latihan militer Filipina dan Amerika Serikat yang akan berlangsung dua minggu setelah pidato tersebut merupakan latihan militer terakhir kedua negara.¹⁷ Duterte menyatakan untuk menghentikan segala bentuk operasi militer Amerika Serikat termasuk patroli kapal militer bersama Amerika Serikat dalam rangka membantu di sekitar wilayah Laut Tiongkok Selatan. Duterte beranggapan bahwa dengan ikut sertanya militer Amerika Serikat di dalam membantu Filipina akan dikonsiderasikan oleh Tiongkok sebagai sebuah tindakan agresif yang membuat perdamaian antara kedua negara sulit untuk dicapai (Tamatoka, 2017: 10).

- *Joint Statement* Pembentukan Mekanisme Komunikasi Bilateral.

Mekanisme Konsultasi Bilateral atau *Bilateral Mechanism Consultation* adalah sebuah upaya yang dicanangkan pertama kali oleh Duterte pada bulan Oktober tahun 2016 di dalam kunjungannya ke Tiongkok. Mekanisme ini ditempuh dengan pertimbangan bahwa Tiongkok selalu menolak untuk menyelesaikan sengketa melalui kerangka multilateral atau lembaga internasional (Fooke, 2018: 2). Mekanisme konsultasi bilateral adalah sebuah kerangka bagi pemerintah Filipina dan Tiongkok untuk berunding bersama di dalam mengatasi perbedaan pandangan dan kepentingan antara kedua negara di Laut Tiongkok Selatan. Setelah dicanangkan pada pertemuan kedua pemimpin negara saat kunjungan Duterte pada Oktober 2016, Filipina dan Tiongkok secara resmi menandatangani *joint statement* mekanisme konsultasi bilateral pada forum Pertemuan Menteri antara kedua negara ke-20 pada tahun 2017 (Fooke, 2018: 3).

¹⁷The Guardian Post, "Rodrigo Duterte to End Joint US and Philippine Military Drills", 2016, <https://www.theguardian.com/world/2016/sep/29/rodrigo-duterte-to-end-joint-us-and-philippine-military-drills>, diakses pada 14 Desember 2018 Pukul 16.50

Pertemuan tingkat Menteri ini baru terjalin kembali setelah beberapa tahun terhenti semenjak pertemuan Tingkat Menteri ke-19 pada tahun 2013. Pada pertemuan pertama ini dibahas mengenai kerangka acuan kerja (TOR) *joint statement* yang meliputi pertukaran pandangan kedua negara terkait isu di Laut Tiongkok Selatan, penjajakan kerja sama maritim dan pembentukan lembaga diantara kedua negara serta menyetujui bahwa perwakilan kedua negara di dalam pertemuan Tingkat Menteri setiap enam bulan sekali yang membahas hal-hal terkait penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan di dalam kerangka mekanisme konsultasi bilateral (Fooke, 2018: 4).

Pertemuan kedua pembahasan mengenai mekanisme konsultasi bilateral ini diadakan di Manila pada Februari 2018. Di dalam pertemuan kedua ini, Filipina diwakili oleh Menteri Luar Negeri Filipina, Enrique Manalo. Sementara itu, Tiongkok yang diwakili oleh wakil Menteri Luar Negeri Kong Xuanyo. Pada pertemuan ini terdapat beberapa poin yang disepakati yaitu kedua negara menyepakati bahwa penyelesaian sengketa antara kedua negara adalah dengan cara damai dan non kekerasan sesuai ketentuan UNCLOS 1982. Selanjutnya kedua negara juga sepakat berkomitmen di dalam pengimplementasian *Code of Conduct* COC di Laut Tiongkok Selatan tahun 2002. Ketiga kedua negara juga menyepakati peningkatan kerja sama di dalam perlindungan laut, perikanan, penelitian di laut, pengolahan minyak dan gas di dalamnya.¹⁸

- *Joint Ventures Terkait Oil Exploration*

Kebijakan Filipina selanjutnya adalah *joint ventures* terkait *oil exploration* minyak bumi di kawasan Reed Bank. Kebijakan ini pada dasarnya berkaitan langsung dengan kepentingan nasional Filipina. Di dalam MOU yang dirilis secara resmi pada 29 November 2018 tersebut, terdapat beberapa ketentuan mengenai kerja sama pengelolaan minyak bumi di kawasan Laut Tiongkok Selatan termasuk di kawasan Reed Bank. Di dalam draft MOU tersebut juga terdapat ketentuan

¹⁸The Ministry of Foreign Affairs of People's Republic of China, "The Second Meeting of China-Philippines Bilateral Consultation Mechanism on The South China Sea Held in Manila", https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbxw/t1536593.shtml, diakses pada 15 Desember 2018 Pukul 10.38

mengenai pembagian pengelolaan minyak bumi dan gas 60% untuk Tiongkok dan 40% untuk Filipina di kawasan Reed Bank sebagaimana yang diwacanakan oleh Presiden Duterte pada masa awal pemerintahannya (Batongbacal, 2018).

Kebijakan *joint ventures* di dalam pengelolaan minyak dan gas berkaitan dengan sengketa antara Filipina dan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan, salah satunya di kawasan Reed Bank. Reed Bank sendiri memiliki kekayaan minyak bumi sebesar 5,4 juta barel dan 55,1 triliun kubik gas alam (Santamaria, 2013). Hal inilah yang kemudian membuat kawasan ini bagi Filipina merupakan ladang energi cadangan bagi kebutuhan energi listrik mereka. Jumlah energi minyak bumi di kawasan Reed Bank adalah dua kali lipat dari energi dari pemasok utama energi listrik Filipina di kawasan Malampaya. Jumlah potensi energi listrik di kawasan Malampaya sendiri diperkirakan akan habis pada tahun 2025 (Malino, 2018).

Di dalam memandang hal ini, Filipina di zaman pemerintahan Duterte lebih cenderung berfikir pragmatis (Massigan, 2018). Pada tahun 2018, Filipina akhirnya mengeluarkan kebijakan kooperatif yang menawarkan pembagian 60% pengelolaan eksplorasi minyak dan gas alam di kawasan Reed Bank untuk Tiongkok di dalam *Joint Ventures* terkait eksplorasi minyak di Laut Tiongkok Selatan.¹⁹ Kekayaan alam yang berada di kawasan Reed Bank memang merupakan kepentingan yang harus dipertahankan oleh Filipina. Tindakan Duterte yang menginginkan hanya 40% dari pengelolaan kekayaan alam di Kawasan Reed Bank secara dangkal memang diartikan sebagai tindakan yang merugikan kepentingan Filipina.

Dibukanya pembicaraan mengenai *oil exploration* ini sendiri merupakan kebijakan yang didasarkan kepada pertimbangan bahwa pembagian keuntungan sebesar 40% untuk Filipina merupakan kebijakan yang memberikan keuntungan maksimum. Pertimbangan Duterte adalah militer Tiongkok memiliki kapasitas yang sangat baik apabila dibandingkan dengan Militer Filipina, dimana mereka menguasai wilayah Laut Tiongkok Selatan termasuk di dalamnya wilayah Reed

¹⁹Reuters, "Philippines earmarks Two Sites for Possible *Joint* Oil Exploration With Tiongkok", Reuters Media, 2018, <https://www.reuters.com/article/philippines-Tiongkok-southTiongkoksea-energy/philippines-earmarks-two-sites-for-possible-joint-oil-exploration-with-Tiongkok-id/> diakses pada 20 September 2018 Pukul 19.29

Bank. Sehingga tindakan provokasi di dalam rangka mempertahankan klaim seutuhnya bukanlah jalan yang dapat ditempuh oleh Filipina. Oleh karena itu sebagaimana yang disampaikan oleh Duterte, Filipina harus mengeluarkan kebijakan kerja sama pengelolaan dengan jalur damai (Andrew, 2018). Pertimbangan pragmatis lainnya adalah dengan adanya *joint ventures* ini sendiri maka membuka peluang adanya investasi Tiongkok di dalam pengelolaan minyak bumi dan gas alam di Filipina. Tiongkok dapat dijadikan sebagai rekan kerja sama di dalam berbagai hal teknis termasuk didalamnya transfer modal dan teknologi pengelolaan minyak di kawasan Reed Bank yang pada akhirnya berguna bagi kepentingan ekonomi Filipina. MOU ini juga mengatur mengenai adanya mekanisme bantuan keuangan di dalam aktivitas eksplorasi dalam skala besar, pengembangan dan pemanfaatan energi mineral, minyak bumi yang dapat berkontribusi bagi perekonomian dan kesejahteraan kedua negara.²⁰

KESIMPULAN

Klaim Filipina dan Tiongkok terhadap Laut Tiongkok Selatan telah menimbulkan sengketa antara kedua negara. Penelitian ini menggambarkan dan menjabarkan mengenai proses pembuatan kebijakan luar negeri Filipina yang bersifat kooperatif pada masa pemerintahan Duterte terhadap agresivitas Tiongkok terkait sengketa Laut Tiongkok Selatan. Berdasarkan proses pembuatan kebijakan luar negeri dengan konsep *rational choice model*, penulis menemukan bahwa para aktor pembuat kebijakan yang terdiri atas Duterte sebagai Presiden dan Senat sebagai lembaga legislatif memiliki motivasi kepentingan ekonomi dan keamanan yang ingin dipertahankan. Kepentingan ekonomi antara lain adalah posisi Tiongkok sebagai mitra dagang terbesar, investasi \$1 miliar dolar di bidang energi dan bantuan proyek infrastruktur sebesar \$ 11,7 juta. Sementara itu kepentingan keamanan Filipina adalah penandatanganan MOU kerja sama pemberantasan narkoba (War on Drugs) dimana Tiongkok memberikan hibah sebesar ₱ 714,57 triliun serta bantuan pemberantasan terorisme di Filipina Berdasarkan kepentingan tersebut, para pembuat kebijakan telah melakukan proses kalkulasi keuntungan dan

²⁰ Offi 35 Website Departement Energy of Republic of The Philippines, "Joint Exploration With China in The West Philippine's Sea", 2018, <https://www.doe.gov.ph/energist/joint-exploration-china-west-philippine-sea> diakses pada 15 Desember 2018 Pukul 10.26

kerugian pengambilan kebijakan yang terdiri dari dua pilihan yaitu kebijakan kooperatif dan konfrontatif.

Berdasarkan proses penelitian yang dilakukan, penulis menemukan bahwa kebijakan kooperatif merupakan pilihan kebijakan yang menimbulkan keuntungan yang lebih besar bagi Filipina. Para pembuat kebijakan telah mengkalkulasikan kepentingan ekonomi dan keamanan yang besar terhadap Tiongkok sehingga akan menimbulkan kerugian yang besar jika mengambil kebijakan yang konfrontatif. Sehingga pada tahap *choice* atau pemilihan kebijakan, Filipina di masa pemerintahan Duterte mengambil kebijakan yang bersifat kooperatif. Kebijakan tersebut antara lain meliputi mendekatkan diri dengan Tiongkok, pembentukan mekanisme konsultasi bilateral terkait penyelesaian sengketa dan joint ventures terkait *oil explorations* di kawasan Reed Bank

DAFTAR PUSTAKA

- Apriwan, Poppy Irawan dan Sofia Trisni. 2016. "Strategi Indonesia dalam Merespons Kebangkitan Tiongkok pada Masa Kepemimpinan SBY (Studi Kasus : Konflik Laut Tiongkok selatan)". *Andalas Journal of International Relations*, No.2 (5) :138
- Batongbacal, Jay. , 2018. "The Philippines-China MOU On Cooperation in Oil and Gas Development". *Asia Maritime Transparency Initiative*
- BBC News. 2011. "Sengketa Kepemilikan Laut Tiongkok Selatan". BBC Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2011/07/110719_spratlyconflict
- Blancard, Ben. , 2016. "Duterte Aligns Philippine With China, Say U.S Has Lost". ReutersMedia.<https://www.reuters.com/article/us-china-philippines/duterte-aligns-philippines-with-china-says-u-s-has-lost-idUSKCN12K0AS>
- Blanton, Shanon L dan Charle Kegley. 2017. "World Politics : Trend and Transformation", Univesity of Princeton. Hal.58
- Bundang Rew. 2016. Official Website of The Philippines House of Representative, "Speaker Belmonte hopes Duterte administration will confront West Philippine Sea and Southeast Asian integration issues with wisdom and resolve", House of Representatives of Republic of The Philippines Press Release.

- Dancel, Raul. 2014. ⁷ "China's Air and Naval Facilities on Contested Islands In South China Sea 'Almost Ready'", Straitimes News, <https://www.straitstimes.com/asia/sc-asia/new-photos-show-china-is-nearly-done-with-its-militarisation-of-south-china-sea>
- Delizo, Michael. 2016. ²² "Will Not Go To War vs China over China Issue", The Manila Times, <https://www.manilatimes.net/i-will-not-go-to-war-vs-china-over-little-issue/269214/>
- Dyan Kostermans. 201³⁰. "Sengketa Antara Tiongkok dan Filipina", Daily Worker Indonesia, <https://www.dw.com/id/sengketa-antara-cina-dan-filipina/a-15945850>
- ¹² Farhana, Faudzan. 2014. "Memahami Perspektif Tiongkok dalam Upaya penyelesaian Laut Tiongkok Selatan", Jurnal Penelitian Politik.No.1.(11)
³ <http://ejournal.lipi.go.id/index.php/jpp/article/viewFile/196/80>
- ³⁴ Fooke, Lye Liang. 2018. "The China-Phillpine Bilateral Consultative Mechanism on The South China Sea : Prospects and Challenges" ISEAS Yusof Ishak Institute. No.14, Hal.2
- Fransisco ,Rosemarie. 2012. "Philippines Allert An -Anti China Protest, Beijing Frets", Reuters News
- ¹⁷ Green, Richard. 2016. "Pengadilan PBB Batalkan Klaim Tiongkok atas Laut Tiongkok Selatan". VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/pengadilan-pbb-batalkan-klaim-Tiongkok-atas-laut-Tiongkok-selatan/3414729.html>
- ¹² Haryanto, Agus dan Areif Bakhtiar,"Sengketa Laut Tiongkok Selatan : Ancaman Bagi Komunitas Keamanan Asean?", Global and Strategies Journal. No.2 (9) :285
- ²⁶ Homre, Shemarie dkk. 2016. "Preliminary Checklist of Marine Gastropods and Bivalves in the Kalayaan Island Group Palawan, Western Philippines", Philippine Journal of Systematic Biology. Vol.10:25,<https://www.csis.org/analysis/south-Tiongkok-sea-focus>
- ⁴⁴ Ilano, Jhino. 2017. "Development and Present Status of Economic Relations Between China and Philippines".Ugong Faculty Journal. Vol.9 :81
- ⁴² Jash, Armita. 2017. "The Emerging Role of Brics in The Changing World Order". Indrastra Global. No.6 (3) :6

- ¹⁶ Jisi, Wang. 2010. "The Trends of Contemporary World Politics and China's Global Role". *Procedia and Social Global Sciences.*, Vol.41 :6651
- Malino, L Alito. 2018. "Phillipine Joint Oil Exploration with Tiongkok : Path to Peace or Pipe Dream?". *Asia News Network*
<http://www.nationmultimedia.com/detail/opinion/30343633>
- Massigan Andrew J. 2018. "Joint Exploration With China in The West Philippine's Sea". *Bussiness World Publishing*. <http://www.bworldonline.com/joint-exploration-with-china-in-the-west-philippine-sea>
- Mindanao News. 2018. "Duterte Transcripts : ³⁶ nse-Filipino Busness Club".
<https://www.midanews.com/duterte-files/2018/02/duterte-transcripts-chinese-filipino-business-club-19-feb-2018>
- ⁶ Mirasol,Jeremey Dexter.2017. "Coorporation With China on The Phillpines War on Drugs",*Centre for International and Security Studies Foreign Service Institute Republic of The Philippines*. No.10(4).
- ²³ National Security Council of Phillpines.2017. "National Security Policy for Change and Well-Being of The Filipino People", *NSC Documents*. Hal 6-11
- ²⁸ Official Website of Departement of Foreign Affairs Philippines. 2012." *Philippine Position on Bajo Masinloc (Scarbrough Shoal) and The Waters within Its Vincinity*"
- Official Website Departement Energy³⁵ f Republic of The Philippines.2018. "Joint Exploration With China in The West Philippine's Sea".
<https://www.doe.gov.ph/energist/joint-exploration-china-west-philippine-sea>
- Official Website of Philipines Statics Authority.2017." Foreign Investment In The Phillpines : Fourth Quater 2017", *PSA Report*.hal 35
- ⁷³ Official website of Phillpines Departments of Foreign Affairs. 2017. "Joint Statement between The Government of the Republic of Philippines and The Goverment of People's Republic of Tiongkok"³⁸
- Official Website of Phillpine Statisics Authority Republic of The Phillpines. 2016. "Foreign Trade of Philippines.", <https://psa.gov.ph/content/foreign-trade-statistics-philippines-2016>⁴¹

- Official Website of The Government of Philippines.2017. ¹⁸ “The Constitution of The Republic of The Philippine”, <https://www.officialgazette.gov.ph/constitutions/1987-constitution/>
- ³³ Ortuoste Maria. 2013. “The Philippines In The South China Sea : Out of Time, Out of Options?”, South East Asian Affairrs Journal. Hal.240
- Panarina, DS. 2017. “President Rodrigo Duterte : Who is He?”, Vestrik RUDN International Relations Journal. No.3 (17) : 593
- Pattamon ,Ponziri. ⁶⁸ 2017. “The Territorial Dispute over South Tiongkok Sea”, ¹⁵ Willy Brandt School of Public Policy University of Erfrut
- Philippines Presidential Communication Service. 2018. ¹ “Speech of President Rodrigo Roa Duterte During The Opening Ceremonies of The Babao Forum Asia. <https://pcoo.gov.ph/presidential-speech/speech-of-president-rodrigo-roa-duterte-during-the-opening-ceremonies-of-the-boao-forum-for-asia/>,
- Phillipine National Statistics Office 2006 dalam ⁵ Morada, Noel M.2007.”The Rise of China and Regional Response : A Philippine Perspective”,National Institute for Defense Studies Publicaton. Chapt. IV: 113
- Placido, Darel. 2018. ²⁵ “Duterte Thanks “Several Equal” China for Infra, A ²⁵ Terror Aid”, ABS-CBN Nawa. <https://news.abs-cbn.com/news/04/10/18/duterte-thanks-sovereign-equal-china-for-infra-anti-terror-aid>
- Polling, B Gregory. ⁴³ 2013.”The South Tiongkok Sea In Focus : Clarifying the Limits of Maritime Disputes”, CSIS Sumitro Chair for South East Asia Studies Report. hal 11
- Press and Public Affai ³⁹ Bureau of House of The Representatives Republic of The Philipines. 2017. “DND, AFP update House on national security issues”.
- Reuters, “Phillipines Earmarks Two Sites ¹⁰ for Possible Joint Oil Exploration With Tiongkok”, Reuters Media, 2018, <https://www.reuters.com/article/philippines-Tiongkok-southTiongkoksea-energy/philippines-earmarks-two-sites-for-possible-joint-oil-exploration-with-Tiongkok-id/>
- Rosen, Mark E. 2018. ⁵⁷ “Philippines Claim in The South China Sea : A Legal Analysis”. Hal 3-5

- Santamaria, Carlo¹³. 2013. "Reed Bank 'Hold Huge Oil and Gas Reserve', Rappler Media. <https://www.rappler.com/business/21460-reed-bank-holds-untapped-riches-us-agency>
- Snidal, Duncan. 2017. "Rational Choices and International Relations", Sage Publication. hal 87
- ⁹ Social Weather Sessions. 2018. Third Quarter 2018 Social Weather Survey: Pinoy maintain anti-Chinese stance on West Philippine Sea issue"
- ³² Stern, Tom K. 2004. ³² Chinese Investment in the Philippines". Journal of Political Risk. No.6 (4). <http://www.jpolarisk.com/chinese-investments-in-the-philippines/>
- ³¹ Thayer, Carlyle A. 2014. "Chinese Assertiveness in the South China Sea and Southeast Asian Responses, Journal of Current Southeast Asian Affairs". No.2 (30) :79
- ⁴⁸ The Guardian ⁴⁸st. 2016. "Rodrigo Duterte to End Joint US and Philippine Military Drills". <https://www.theguardian.com/world/2016/sep/29/rodrigo-duterte-to-end-joint-us-and-philippine-military-drills>
- ⁷² The Mindano News. ⁴⁰6. "Duterte Transcripts : Philippines China Trade and Investment Forum". <https://www.mindanews.com/duterte-files/2016/10/duterte-transcripts-philippines-china-trade-and-investment-forum/>
- ⁸ The Ministry of Foreign Affairs of People's Republic of China, "The Second Meeting of China-Philippines ⁵⁶teral Consulation MechanismeThe on The South China Sea Held in Manila", https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbxw/t1536593.shtml
- ¹³ Tiezzi, Shannon. 2018. "Duterte's China Convergence Continues". The Diplomat News. <https://thediplomat.com/2018/04/dutertes-china-convergence-continues/>
- ⁷ Tomotaka, Shoji. 2017. "Southeast Asia : Duterte Take Office, South Tiongkok Sea in Flux". East Asian Publication. Chapter 5, hal 135
- ²⁹ United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. 2018. "The Philippine National Study : Infrastructure Financing Strategies for Sustainable Development". UNESCAP Report. hal 3
- ²⁷ Velasco, Mark Anthony. 2015. Visiting Forces Agreement (VFA) in The Philippines : Insight on Issues of Sovereignty, Security and Foreign Policy", Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Reserach. No.4 (3) : 83

Wiswayana, Wishnu Mahendra. 2016. "Dinamika Permasalahan Laut Tiongkok Selatan dan Tantangan Terhadap Ide **50**os Maritim Dunia", *Andalas Journal of International Relations*, No.1(5):10, <http://ajis.fisip.unand.ac.id/index.php/ajis/article/view/57/50>

Yost Kristofel. 2013. "Tensions in The South Tiongkok Sea : Why The Phillipines is Challenging Tiongkok's Improved Military Might", *Calhoun and The NPS Institutional Archive Dspace Respository*

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

15%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

philippinefails.blogspot.com

Internet Source

1%

2

www.thedailyliberator.com

Internet Source

1%

3

repository.uinjkt.ac.id

Internet Source

1%

4

www.tribune.net.ph

Internet Source

1%

5

nccur.lib.nccu.edu.tw

Internet Source

1%

6

Submitted to Universiteit van Amsterdam

Student Paper

1%

7

Submitted to Nanyang Technological University,
Singapore

Student Paper

1%

8

Submitted to University of Sydney

Student Paper

1%

9

Submitted to King's College

10

Submitted to University of Lancaster

Student Paper

1 %

11

www.congress.gov.ph

Internet Source

<1 %

12

Submitted to Universitas Negeri Padang

Student Paper

<1 %

13

Submitted to Australian National University

Student Paper

<1 %

14

nwpcapital.com

Internet Source

<1 %

15

www.scribd.com

Internet Source

<1 %

16

Submitted to University of Kent at Canterbury

Student Paper

<1 %

17

Submitted to iGroup

Student Paper

<1 %

18

Submitted to University of London External System

Student Paper

<1 %

19

Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Student Paper

<1 %

Submitted to Bond University

20

Student Paper

<1 %

21

virginiasherin.wordpress.com

Internet Source

<1 %

22

www.viet-studies.net

Internet Source

<1 %

23

www.jstage.jst.go.jp

Internet Source

<1 %

24

www.chanrobles.com

Internet Source

<1 %

25

test.abs-cbnnews.com

Internet Source

<1 %

26

spheres.dost.gov.ph

Internet Source

<1 %

27

Submitted to Defence Academy (Royal Brunei
Armed Forces)

Student Paper

<1 %

28

www.tandfonline.com

Internet Source

<1 %

29

Submitted to Ecoles Militaires de Saint-Cyr
Coetequidan

Student Paper

<1 %

30

Submitted to President University

Student Paper

<1 %

31	James Manicom. "China and American Seapower in East Asia: Is Accommodation Possible?", Journal of Strategic Studies, 2014 Publication	<1 %
32	Submitted to University of Southern California Student Paper	<1 %
33	academic.oup.com Internet Source	<1 %
34	Submitted to Deakin University Student Paper	<1 %
35	www.e-ir.info Internet Source	<1 %
36	www.mindanews.com Internet Source	<1 %
37	repository.unand.ac.id Internet Source	<1 %
38	Mary Fides A. Quintos. "The Philippines: Hedging in a Post-Arbitration South China Sea?", Asian Politics & Policy, 2018 Publication	<1 %
39	retiredanalyst.blogspot.my Internet Source	<1 %
40	spratlyislandsconfidential.com Internet Source	<1 %

41	Submitted to University of Leicester Student Paper	<1 %
42	Submitted to De La Salle University - Manila Student Paper	<1 %
43	Submitted to Infile Student Paper	<1 %
44	Submitted to Ateneo de Manila University Student Paper	<1 %
45	Submitted to Universitas Terbuka Student Paper	<1 %
46	Submitted to School of Oriental & African Studies Student Paper	<1 %
47	Submitted to University of Malaya Student Paper	<1 %
48	www.theguardian.com Internet Source	<1 %
49	www.dfa.gov.ph Internet Source	<1 %
50	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
51	Submitted to Georgetown University Student Paper	<1 %

52	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	<1 %
53	en.wikipedia.org Internet Source	<1 %
54	Submitted to Santa Margarita Catholic High School Student Paper	<1 %
55	Yanto Yanto. "PENDIDIKAN NILAI DAN SPIRITUAL (PNS) DALAM LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING DI SMP NEGERI 1 BANTUL YOGYAKARTA", AHSANA MEDIA, 2019 Publication	<1 %
56	Submitted to Leiden University Student Paper	<1 %
57	Submitted to Luiss Guido Carli University Student Paper	<1 %
58	dspace.sti.ufcg.edu.br:8080 Internet Source	<1 %
59	iesco-wesa.org Internet Source	<1 %
60	id.scribd.com Internet Source	<1 %
61	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas	<1 %

62

davidchristianzacl.blogspot.com

Internet Source

<1 %

63

gombakpost.blogspot.com

Internet Source

<1 %

64

rodliat.blogspot.com

Internet Source

<1 %

65

ssantika.wordpress.com

Internet Source

<1 %

66

www.neliti.com

Internet Source

<1 %

67

rosdok.uni-rostock.de

Internet Source

<1 %

68

Submitted to Anglia Ruskin University

Student Paper

<1 %

69

Submitted to Universitas Airlangga

Student Paper

<1 %

70

Submitted to Padjadjaran University

Student Paper

<1 %

71

MOHAMMAD ZAKI AHMAD, MOHD
AZIZUDDIN MOHD SANI. "China's Assertive
Posture in Reinforcing its Territorial and
Sovereignty Claims in the South China Sea: An

<1 %

Insight into Malaysia's Stance", Japanese Journal of Political Science, 2017

Publication

72

Submitted to University of Edinburgh

Student Paper

<1 %

73

Submitted to Loughborough University

Student Paper

<1 %

74

Submitted to Defense University

Student Paper

<1 %

75

Submitted to Universitas Brawijaya

Student Paper

<1 %

76

Submitted to Universiti Malaysia Sabah

Student Paper

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off